

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini menuntut perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam mengembangkan bisnis perusahaan membutuhkan modal yang besar. Modal tersebut bisa diperoleh dari investor dan pinjaman dari kreditur. Sebelum investor dan kreditur memutuskan untuk melakukan investasi dan memberikan pinjaman mereka harus memiliki keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan tersebut diperoleh dari laporan keuangan sebagai sumber informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan harus mencerminkan keadaan dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Untuk memberikan rasa aman dan percaya baik investor maupun kreditur maka dibutuhkan pihak ke 3 yang memiliki independensi untuk memeriksa (mengaudit) laporan keuangan perusahaan tersebut dan menghasilkan opini mengenai laporan keuangan tersebut.

Akuntansi memiliki hubungan erat dengan informasi atas kinerja suatu perusahaan yang tentunya dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk mengkomunikasikan informasi tersebut, proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari beberapa laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan

laba rugi komprehensif selama periode, laporan atas arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut tentunya memiliki tingkat kepercayaan yang dikatakan rendah terlebih untuk pihak eksternal. Untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal seperti pemegang saham laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh pihak ke 3 yaitu auditor eksternal. Dengan laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh pihak auditor eksternal maka tingkat kepercayaan dan keandalan laporan keuangan tersebut meningkat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terlebih untuk pihak eksternal.

Perusahaan yang go public diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Tentunya kebutuhan atas jasa akuntan publik semakin meningkat dan dalam melakukan audit diperlukan waktu keahlian dan profesionalitas yang baik. Atas jasa yang telah diberikan KAP kepada kliennya, KAP berhak mendapatkan *fee* audit dengan nominal yang telah disepakati bersama. Peraturan tentang dasar pengenaan *fee* audit telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui peraturan pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Besarnya *fee* audit biasanya masih didasari oleh negosiasi antara klien dengan KAP. Di Indonesia besarnya *fee* audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang mengingat banyaknya factor yang mempengaruhinya.

Fenomena yang terjadi disektor audit yang berkaitan dengan akuntan publik juga *fee* audit yaitu kasus Enron Corporation kasus yang menggemparkan dunia dengan

mengelembungkan nilai laba perusahaan dengan tujuan menyembunyikan kerugian dan hutang. Manipulasi yang tersaji dibiarkan oleh akuntan public Arthur Andersen (AA) dan (AA) mendapatkan fee audit sampai dengan \$25 juta dari Enron pada Tahun 2000. Angka itu belum termasuk uang senilai \$27 juta sebagai *fee* konsultan dan pekerjaan lainnya. Kemudian Akuntan Publik (AA) dinyatakan bersalah dalam kasus enron. Reputasi Arthur Anderson hancur dan akhirnya dijual kerekan-rekan Big Five (KPMG, Ernst & Young, Deloitte dan Price Waterhouse Coopers yang kemudian menjadi Big Four.

Kemudian Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang menyebabkan kerugian berbagai pihak termasuk Perbankan dengan jumlah yang besar. AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan milik PT SNP Finnance. Akuntan Publik dan KAP SBE dikenai sanksi untuk sementara tidak diijinkan melakukan proses audit jasa keuangan dan pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif sampai batas waktu yang belum ditentukan (Dea Chandiza Syafina, 2018 detikfinance.com, 8 Oktober 2018)

Pada tahun 2018, PT Bukopin melakukan re-statement laporan keuangan mereka selama 3 tahun berturut-turut karena overstatement. Pos-pos yang direvisi adalah posisi kredit, pendapatan berbasis komisi, pendapatan provisi dan komisi, dan jumlah kartu kredit berubah tidak semestinya. Selain itu, Bank Bukopin juga merevisi turun laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun.

Permasalahan tersebut timbul ketika adanya temuan oleh internal Bukopin pada tahun lalu. Namun, KAP yang mengaudit Bank Bukopin, EY serta OJK luput dari pengawasan tersebut. Permasalahan mengenai restated (penyajian kembali) laporan keuangan 2016 merupakan temuan dari manajemen yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntansi Publik untuk dilakukan restated pada laporan keuangan 2017 (Banjarnahor,2018 CNNINDONESIA.com, 1 September 2018).

Dari beberapa kasus yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menutupi atau mendeteksi kecurangan yang terjadi diperusahaan. Risiko yang dihadapi oleh auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan juga akan berpengaruh terhadap *fee* audit yang akan mereka terima. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti *fee* audit di sector perbankan yang dalam pelaksanaanya terikat oleh berbagai regulasi dan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga keuangan seperti OJK, BI dan Kementrian Keuangan. Kemudian faktor-faktor yang dominan dalam penetapan besarnya *fee* audit antara lain, risiko kredit, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan dan masih banyak lagi faktor lainnya.

Mengenai risiko kredit jika suatu perusahaan memiliki risiko kredit yang tinggi tentunya akan menambah waktu dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam mengaudit suatu laporan keuangan yang tentunya akan berdampak pada besaran *fee* audit (Purwanto, 2017). Untuk mengukur besar kecilnya suatu risiko kredit dapat kita lihat dari rasio NPL (*Non-Performing Loan*) yang merupakan cerminan kredit bermasalah..

Untuk perusahaan dengan risiko kredit yang besar tentunya akan berdampak pada besaran *fee* auditnya dan juga sebaliknya. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Immanuel, 2014) untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asset, semakin besar total asset yang dimiliki suatu perusahaan tentunya akan menambah waktu dan kinerja dari auditor eksternal (KAP) yang juga akan menambah besaran *fee* audit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan juga dapat dilihat dari jumlah anak perusahaan. Semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki suatu perusahaan akan membuat proses audit menjadi semakin sulit dan lama yang tentunya akan berpengaruh pada *fee* audit nantinya. Kelompok perusahaan besar dengan banyak anak perusahaan dan anak cabang terkait dengan pekerjaan ekstra yang akan dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan konsolidasian.

Besarnya *fee* audit tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya (Mulyadi, 2002). Semua hal tersebut akan mempengaruhi besarnya *fee* audit. Risiko kredit dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio NPL yang merupakan cerminan kredit yang bermasalah. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan dengan proksi jumlah anak perusahaan yang

dimiliki oleh suatu perusahaan. Berkaitan dengan *fee* audit penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanusi dan Purwanto (2017) memberikan bukti empiris bahwa risiko perusahaan, ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal ini terjadi dikarenakan ukuran perusahaan tidak menjadi salah satu indikator dalam menentukan *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di index Kompas100. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Immanuel dan Yuyetta (2014) yang menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shafira dan Ghozali (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit *fee* sedangkan risiko audit dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali guna mengetahui lebih pasti pengaruh risiko kredit dan ukuran perusahaan terhadap *Fee* audit. Selain itu dari penelitian terdahulu untuk variable dependen *fee* audit diukur berdasarkan *professional fees* dimana *professional fees* tidak hanya mencerminkan *fee* audit melainkan gabungan dari beberapa jasa professional lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang didominasi dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, penelitian kali ini menggunakan objek perusahaan perbankan karena peneliti tertarik oleh issue yang beredar bahwa untuk *fee* audit pada perusahaan perbankan jauh lebih besar dibandingkan perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan perbankan

dalam menjalankan bisnisnya terikat oleh aturan – aturan yang lebih kompleks dari menteri keuangan dan OJK dan BI.

Lemabaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempermudah masyarakat dalam menyimpan dana, membutuhkan dana dan kegiatan usaha bergerak dibidang keuangan. Bank memiliki tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank sangat berperan penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Bank merupakan lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga bank harus menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas yaitu informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan nasabah bank. OJK berperan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti pada Bank, Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank (IKNB). Sejauh informasi yang diperoleh peneliti untuk penelitian *fee* audit pada perusahaan perbankan belum didapatkan. Sehingga *fee* audit pada perusahaan perbankan menurut peneliti sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan peneliti berharap dapat berkontribusi pada *literature* bidang auditing nantinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Kredit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”**

1.2. Rumusan Masalah

Fee audit merupakan imbalan jasa yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang telah diberikan kepada kliennya. Besaran *fee* audit tergantung dari hasil negosiasi antara auditor dengan klien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap *fee* audit?
- 2 Apakah ukuran perusahaan dengan proksi total aset dan anak perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dari risiko kredit terhadap *fee* audit
- b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian mengenai “Pengaruh risiko kredit dan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit” ini diharapkan akan membawa manfaat bagi beberapa pihak.

- a. Dapat berkontribusi terhadap literature bidang auditing terkait dengan penelitian *fee* audit.
- b. Menjadi sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya dengan topik penelitian *fee* audit menggunakan variabel risiko kredit dan ukuran perusahaan.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam membuat regulasi *fee* audit menggunakan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang Teori Keagenan, fee audit, risiko kredit, ukuran perusahaan, Kerangka Konseptual, penelitian terdahulu dan model empiris.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang objek penelitian, populasi penelitian, sampel dan kriteria penelitian, variabel penelitian, jenis & teknik pengumpulan Data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang sampel penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.